

# **ANALISIS KESENJANGAN KEPEMILIKAN KOMPUTER ANTARA MASYARAKAT DESA DAN KOTA BERDASARKAN DATA BPS DARI TAHUN 2012-2022 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MODEL PENGEMBANGAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN**

<sup>1</sup>Nur Rastie Deviani, <sup>2</sup>Aunurrahman, <sup>3</sup>Venny Karolina  
<sup>1,2,3</sup>Magister Teknologi Pendidikan  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia  
[nurrastiedeviani@gmail.com](mailto:nurrastiedeviani@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Kesenjangan Kepemilikan Komputer Antara Masyarakat Desa dan Kota Berdasarkan Data BPS dari Tahun 2012-2022 dan Implikasinya Terhadap Model Pengembangan Kebijakan Teknologi Pendidikan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui <https://www.bps.go.id/id>. Subjek penelitian yang dilibatkan adalah rumah tangga di setiap provinsi di Indonesia yang dibedakan menjadi dua kategori perkotaan dan pedesaan. Terdapat 38 Provinsi yang masuk dalam data yang dikumpulkan oleh tim Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kota lebih menguasai penggunaan komputer dari pada masyarakat desa dan tren kesenjangan masyarakat memiliki atau menguasai komputer di perkotaan setiap tahunnya mengalami penurunan, sedangkan pada pedesaan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu ketidakmerataan infrastruktur untuk mengakses internet, ekonomi, keterampilan dan literasi digital. Kemudian berdasarkan hasil pengkajian ditemukan beberapa model sistem, model penyelidikan, model elit, model rasional, model inkrementalis, model analisis kebijakan, dan model pendekatan implementasi kebijakan publik. Pengkajian ini juga menemukan bahwa model rasional yang dirasa tepat digunakan untuk kesenjangan terhadap teknologi pendidikan.

*Kata kunci: Kesenjangan Kepemilikan Komputer, Model Pengembangan, Kebijakan, Teknologi Pendidikan*

## **ABSTRACT**

*This study aimed to determine the Analysis of the Gap in Computer Ownership Between Rural and Urban Communities Based on BPS Data from 2012-2022 and Its Implications for the Educational Technology Policy Development Model. The Method of this research was a quantitative approach. This study used secondary data provided by the Central Statistics Agency (BPS) through <https://www.bps.go.id/id>. The research subjects involved were households in each province in Indonesia which were divided into two categories, urban and rural. There were 38 provinces included in the data collected by the Central Statistics Agency (BPS) team. The results of the study showed that urban communities were more proficient in using computers than rural communities and the trend of the gap in people owning or controlling computers in urban areas has decreased every year, while in rural areas it has increased. This was due to several factors, namely the inequality of infrastructure for accessing the internet, economy, skills and digital literacy. Then based on the results of the study, several system models were found, investigation models, elite models, rational models, incrementalist models, policy analysis models, and public policy implementation approach models. This study also found that the rational model was considered appropriate for the gap in educational technology.*

*Keyword: Computer Ownership Gap, Development Model, Policy, Educational Technology*

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam era revolusi menuju 5.0 masyarakat dituntut untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang seiring berjalannya waktu

(Bahirah, 2022). Teknologi dalam pendidikan bermanfaat sebagai sumber ilmu pengetahuan dan pusatnya pendidikan khususnya media elektronik seperti komputer dan jaringan internet (Muttabiah dkk., 2021).

Komputer merupakan perangkat yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia juga mengelola data menjadi informasi serta menyimpannya untuk ditampilkan di waktu mendatang atau saat dibutuhkan (Surono, 2024). Komputer memiliki banyak manfaat seperti memudahkan pencarian dan penyebaran informasi secara cepat, meningkatkan efisiensi kerja, membantu dalam proses belajar mengajar melalui *e-learning*, mempermudah manajemen bisnis, dan mendukung kegiatan desain grafis serta menyimpan dan mengolah data dalam jumlah yang besar secara efektif. Manfaat ini membantu meningkatkan kualitas hidup dan mempercepat perkembangan di berbagai bidang.

Penggunaan teknologi komputer dalam pendidikan telah terbukti efektif dalam meningkatkan mutu belajar siswa dengan memberikan lebih banyak kesempatan untuk belajar secara mandiri dan menarik, serta memberikan pengalaman yang lebih interaktif (Haking & Soepriyanti, 2019). Teknologi komputer bagi pendidikan selain berpengaruh positif, namun juga berpengaruh negatif. Pengaruh negatif yang dilakukan oleh siswa maupun guru yaitu sering mengakses informasi yang mengandung hal tidak baik seperti pornografi atau *game online*, menimbulkan sikap yang apatis baik bagi siswa maupun guru, sehingga siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran dan hasilnya tidak maksimal (Asmani, 2011:149).

Kesenjangan sumber daya manusia (SDM) di kota dan desa terjadi karena kurangnya akses, keterbatasan infrastruktur, maupun pemahaman tentang teknologi. Bagi masyarakat pedesaan terutama pada daerah 3T, internet masih kurang dapat dijangkau (Sukri, dkk., 2022). Diseminasi teknologi meliputi akses, fasilitas, dan pengetahuan masih mendominasi daerah perkotaan. Perlu adanya upaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan digital atau komputer yang terjadi di daerah pedesaan (Susanti dkk., 2023). Komputer merupakan fasilitas yang penting namun belum dirasakan semua penduduk desa dan kota.

Kesenjangan keterampilan komputer antara di kota dan desa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kota biasanya memiliki akses

internet lebih baik dan perangkat komputer dibanding di desa, sekolah di kota sering memiliki fasilitas dan kurikulum yang lebih berfokus pada teknologi, di kota lebih banyak peluang untuk pelatihan dan kursus komputer dibandingkan di desa, dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi di kota memudahkan akses ke perangkat teknologi serta dukungan pemerintah untuk pelatihan komputer lebih banyak ditemukan di kota. Untuk mengatasi kesenjangan ini perlu adanya program pelatihan, investasi infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung pemerataan akses teknologi.

Kesenjangan ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun penelitian sebelumnya tidak menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meneliti kesenjangan antara desa dan kota dalam kepemilikan komputer. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Tugas Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari lembaga pemerintahan sebagai data sekunder, membantu kegiatan statistik di kementerian, mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik serta menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik (BPS, 2024). Keuntungan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penelitian ini peneliti tidak langsung melakukan penelitian karena pada Badan Pusat Statistika sudah mengacu pada pedoman metodologi statistik pemerintahan Indonesia. Peneliti sebelumnya meneliti kesenjangan digital atau komputer hanya satu tahun tidak satu dekade atau sepuluh tahun sebelumnya. Penelitian ini meneliti kesenjangan yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Peneliti ini juga membuat analisa implikasi kesenjangan model kebijakan sebagai tanggapan mengenai kesenjangan kepemilikan komputer pada masyarakat desa dan kota di Indonesia.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang dilakukan

adalah metode survey. Metode Survey adalah satu bentuk teknik dimana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel berupa orang, melalui pertanyaan-pertanyaan (Zikmund dkk., 2010). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode survey adalah suatu metode dimana dalam pengumpulan datanya bisa menggunakan kuesioner dan wawancara yang didapatkan dari sampel berupa orang, yang mana dari data tersebut akan mewakili suatu populasi tertentu sesuai dengan kepentingan penelitian.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui <https://www.bps.go.id/id>. Keunggulan menggunakan data sekunder yaitu datanya mudah didapat, dapat diakses secara *daring*. Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari studi literature, seperti buku, jurnal, makalah, penelitian-penelitian yang berkaitan sebelumnya, dan dapat juga disebut data yang sudah diolah, meliputi data yang digunakan sebagai landasan teori dari penelitian, kapan saja, efisiensi biaya dan kepraktisan dalam pengumpulan data ketika melakukan penelitian.

Objek penelitian ini adalah rumah tangga di setiap provinsi di Indonesia yang dibedakan menjadi dua kategori perkotaan dan pedesaan. Terdapat 38 Provinsi yang masuk dalam data yang dikumpulkan oleh tim Badan Pusat Statistik (BPS) melalui <https://www.bps.go.id/id>.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk pengambilan data pada Badan Pusat Statistik tidak memerlukan izin dikarenakan data tersebut bersifat publik dan tersedia di situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam mengolah data ini adalah peneliti mendownload data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui website <https://www.bps.go.id/id>, hasil download berupa data dalam bentuk excel yang berjudul “persentase rumah tangga yang memiliki/menguasai komputer menurut provinsi dan klasifikasi daerah” yang didownload perperiode dan melakukan kalkulasi perhitungan mean selanjutnya mengkonversi data excel ke SPSS Versi 29.

Penelitian ini menggunakan data survey longitudinal yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 yang terdiri dari 38 Provinsi yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu pedesaan dan perkotaan.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan tren fenomena serta implikasi kesenjangan pada masyarakat kota dan desa dalam memiliki komputer. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik dengan bantuan SPSS.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai kesenjangan kepemilikan komputer antara masyarakat desa dan kota di Indonesia menunjukkan bahwasanya masyarakat kota secara signifikan memiliki komputer dari pada masyarakat desa. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang serupa yang mendukung hasil penelitian ini. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya Oktavianoor (2020) menemukan bahwa penggunaan internet yang terkait dengan penguasaan komputer dikalangan masyarakat desa hanya mencapai 79,79%, sedangkan dikalangan masyarakat kota mencapai 87,55%. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara desa dan kota, dimana desa tertinggal dalam hal penggunaan internet dibanding dengan kota.

Alasan mengapa masyarakat desa banyak yang tidak tahu atau kurang mengetahui penggunaan teknologi karena salah satu faktornya adalah faktor ekonomi (Hadiyat, 2014). Cerelia (2021) menerangkan banyaknya penduduk miskin di daerah pedesaan mengakibatkan mereka tidak dapat mengakses biaya kuota internet dan perangkat elektronik., contohnya adalah komputer dan hal ini menyebabkan terjadinya *learning loss* lebih tinggi oleh peserta didik di pedesaan dari pada di daerah perkotaan pada masa pandemic covid-19. Sedangkan peserta didik perkotaan dengan ekonomi yang lebih baik memudahkan mereka untuk akses teknologi sehingga mereka lebih mudah mendapatkan ilmu pengetahuan melalui internet. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesenjangan ekonomi

antara desa dan perkotaan dapat menyebabkan kesenjangan dalam penguasaan komputer.

Selain faktor ekonomi yang menyebabkan kesenjangan kepemilikan komputer ialah faktor tingkat pendidikan yang rendah. Mukhlis (2011) mengatakan hanya sedikit masyarakat desa yang melanjutkan pendidikan sampai SMA ataupun perguruan tinggi, salah satu daerah yang memiliki pendidikan yang rendah yaitu Desa Dieng Wetan Provinsi Jawa Tengah. Minimnya infrastruktur yang berkaitan dengan teknologi komputer, juga menyebabkan kesenjangan kepemilikan dan penggunaan komputer di desa dan kota, contohnya adalah wireless atau internet di daerah terpencil. Karena keterbatasan dalam mengakses internet di kalangan masyarakat desa, indeks literasi digital pada daerah pedesaan, khususnya daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) mendapat skor sebesar 3,52 (skala 1-5) dan skor ini lebih rendah dibandingkan dengan skor indeks daerah non 3T (Katadata, 2024). Chen & Wallman (2004) juga melaporkan minimnya infrastruktur di pedesaan karena faktor geografis yaitu kepulauan, pegunungan, dan letak daerah yang berjauhan menyebabkan sulitnya akses desa untuk mendapatkan jaringan internet. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketidakmerataan infrastruktur dapat menimbulkan kesenjangan dalam penggunaan dan kepemilikan komputer (Hadiyat, 2014) pada masyarakat desa dan kota.

Fenomena kesenjangan kepemilikan komputer tidak hanya terjadi pada Negara Indonesia, namun juga terjadi di Negara lain, seperti Nigeria dimana masyarakat desa di Nigeria masih banyak yang tidak mampu membeli komputer dan minim kemampuan menggunakan komputer, serta memiliki minim akses internet dibandingkan dengan masyarakat kota (David, 2015; Tayo, 2015). Dengan demikian kesenjangan antar desa dan kota dalam kepemilikan dan penggunaan komputer merupakan fenomena global yang diperlukan solusi untuk meminimalisir kesenjangan sehingga setiap masyarakat mendapatkan pemahaman yang merata sehingga setiap masyarakat mendapatkan pemahaman yang merata sehingga masyarakat sehingga masyarakat desa dapat mendapatkan manfaat

penggunaan komputer untuk peningkatan ekonomi dan kesempatan positif lainnya.

Fenomena penguasaan komputer mengalami kenaikan dalam tujuh tahun (tahun 2012-2018) dan mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir (tahun 2019-2022) pada masyarakat perkotaan. Tren penurunan juga terjadi pada penguasaan komputer di masyarakat pedesaan, dimana pada awalnya mengalami tren kenaikan selama sembilan tahun (tahun 2012-2020) dan akhirnya mengalami tren penurunan dalam dua tahun terakhir (tahun 2021-2022).

Berdasarkan hasil survey indeks literasi digital Indonesia tahun 2022 melaporkan bahwa pengukuran indeks literasi digital Nasional sudah mencapai skor 3,54 (skala 1-5). Survey ini dilakukan untuk mengetahui status literasi digital dan untuk memastikan upaya peningkatan literasi digital masyarakat makin tepat sasaran. Dibandingkan dengan indeks literasi digital pada tahun 2021, terdapat peningkatan skor indeks literasi digital pada tahun 2022 (dari 3,49 ke 3,54) (Katadata, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk mengatasi terjadinya kesenjangan digital.

Begitu juga dengan hasil penelitian (Hadiyat, 2014) yang menemukan jumlah rumah tangga yang memiliki laptop sebanyak 6,12% sedangkan yang tidak memiliki komputer hanya 1,25%. Jumlah ini tidak bahkan mencapai 10% dari total rumah tangga yang ada di Kabupaten Wakatobi. Sedangkan jumlah penggunaan internet hanya sebesar 8,1% dari jumlah rumah tangga yang ada. Hal ini dipengaruhi oleh akses internet dan kualitas internet yang ada di Kabupaten Wakatobi. Hasil penelitian Ariansyah, Anandhita, dan Sari (2019) menunjukkan masih adanya kesenjangan antar provinsi di Indonesia baik itu terkait akses maupun dalam pemahaman terhadap penggunaan teknologi digital. Papua, NTT, dan Sulawesi Tengah memiliki nilai indeks kesenjangan yang cukup besar.

Berdasarkan hasil pengkajian ditemukan beberapa model sistem, model penyelidikan, model elit, model rasional, model inkrementalis, model analisis kebijakan, dan model pendekatan implementasi kebijakan publik. Pengkajian ini juga menemukan bahwa model rasional yang dirasakan tepat digunakan untuk kesenjangan terhadap teknologi

pendidikan. Hal ini dikarenakan pada model kebijakan rasional alokasi sumber daya yang dihasilkan tepat dan efektif, keputusan berdasarkan pada analisis data dan penelitian bukan asumsi, memungkinkan kebijakan diterapkan secara luas dan konsisten, mudah disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan, memudahkan pengukuran hasil dan proses pengembangan kebijakan yang jelas serta terbuka untuk pengawasan. Sehingga dengan model kebijakan rasional ini membantu mengatasi kesenjangan kepemilikan atau penguasaan komputer antara di desa dan kota untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pada model rasional ini usulan kebijakan agar tidak terjadi kesenjangan digital yakni keterlibatan pemerintah, sekolah, orang tua dan siswa untuk meningkatkan pemahaman komputer di daerah perkotaan dan pedesaan. Implementasi kesenjangan kepemilikan komputer antara desa dan kota dalam model pengembangan kebijakan teknologi pendidikan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi ketidaksetaraan termasuk pengembangan infrastruktur, meningkatkan kemahiran teknologi para pendidik, kepegawaian, pengelolaan keuangan yang bijaksana, dan perluasan akses internet bagi setiap siswa serta pelatihan dan pengembangan program pendidikan. Dengan melakukan ini, lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikannya secara keseluruhan dan lebih siap menghadapi dinamika perubahan.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi digital di pedesaan atau daerah terpencil yaitu dengan meratakan infrastruktur yang ada. Dengan meningkatnya infrastruktur diharapkan kesenjangan digital yang terjadi dapat di minimalisir dan meningkatkan pendapatan daerah. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan menyelenggarakan program pelatihan komputer. Melalui program pelatihan, masyarakat di pedesaan akan diberikan pelatihan dasar dalam penggunaan komputer dan internet sehingga dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih optimal dan mengurangi kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan (Khusna, 2019).

Program pelatihan komputer dapat memberikan manfaat bagi masyarakat seperti meningkatkan kemampuan literasi digital, meningkatkan akses informasi dan memperluas kesempatan dalam mencari kerja. Selain itu, program ini juga dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat setempat sehingga dapat membuka peluang usaha dan ekonomi yang lebih luas (Khan, 2020). Oleh karena itu program pendidikan dan pelatihan secara formal ataupun nonformal sangat dibutuhkan oleh siswa dan guru untuk mendukung lancarnya pembelajaran.

Guru dan siswa sebaiknya tidak gagap teknologi karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari khususnya terhadap pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh Green (2002) bahwa orang-orang yang menguasai teknologi maka pengetahuan dan keterampilan akan semakin meningkat dan sebaliknya. Oleh karena itu program-program pendidikan dan pelatihan secara formal maupun nonformal sangat dibutuhkan oleh siswa untuk mendukung kelancaran pembelajaran.

Berdasarkan pemaparan tersebut kebijakan teknologi harus dirancang untuk mengatasi kesenjangan akses, ekonomi, memberikan dukungan yang diperlukan dan memastikan bahwa semua siswa, baik di kota maupun di desa memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan manfaat dari teknologi dalam pendidikan. Ini termasuk investasi dalam infrastruktur, pelatihan dan penyediaan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa kesenjangan kepemilikan komputer antara masyarakat desa dan kota di Indonesia menunjukkan bahwasanya masyarakat kota lebih memiliki komputer dari pada masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil kepemilikan komputer di perkotaan berkisar dari 24,24% sampai dengan 28,61% dan dipedesaan berkisar dari 5,61 % sampai dengan 9,58% dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022. Fenomena kepemilikan komputer mengalami kenaikan dalam tujuh

tahun (tahun 2012-2018) dan mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir (tahun 2019-2022) pada masyarakat perkotaan. Tren penurunan juga terjadi pada kepemilikan komputer di masyarakat pedesaan, dimana pada awalnya mengalami tren kenaikan selama sembilan tahun (tahun 2012-2020) dan akhirnya mengalami tren penurunan dalam dua tahun terakhir (tahun 2021-2022). Dan Implikasi kesenjangan ini terhadap pengembangan model kebijakan teknologi pendidikan. Berdasarkan hasil pengkajian ditemukan beberapa model sistem, model penyelidikan, model elit, model rasional, model inkrementalis, model analisis kebijakan, dan model pendekatan implementasi kebijakan publik. Pengkajian ini juga menemukan bahwa model rasional yang dirasa tepat digunakan untuk kesenjangan terhadap teknologi pendidikan. Hal ini dikarenakan pada model kebijakan rasional alokasi sumber daya yang dihasilkan tepat dan efektif, keputusan berdasarkan pada analisis data dan penelitian bukan asumsi, memungkinkan kebijakan diterapkan secara luas dan konsisten, mudah disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan, memudahkan pengukuran hasil dan proses pengembangan kebijakan yang jelas serta terbuka untuk pengawasan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, Masita, Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2022). Metodologi penelitian kuantitatif. In *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Artianasari, N., & Qadaruddin, M. (2023). Perencanaan komunikasi pesantren Al-Risalah Batetanga upaya mengatasi digital divide. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 24–34.
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model analisis kebijakan pendidikan. *Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192–201.
- Bahirah, H. I. (2022). Smart village sebagai jawaban desa masa depan. *Jurnal Kasajian Komunikasi Dan Studi Media*, 11(2), 23–35.
- Cerelia, J. J., Sitepu, A. A., N, F. A. L., Pratiwi, I. R., Almadevi, M., Farras, M. N., Azzahra, T. S., & Toharudin, T. (2021). Learning loss akibat pembelajaran jarak jauh selama pandemi covid-19 di Indonesia. *Seminar NASIONAL Statistik X*, 1(1), 1–14. [http://semnas.statistics.unpad.ac.id/wp-content/uploads/erf\\_uploads/2021/11/Learning-Loss-Akibat-Pembelajaran-Jarak-Jauh-Selama-Pandemi-Covid-19-di-Indonesia.pdf](http://semnas.statistics.unpad.ac.id/wp-content/uploads/erf_uploads/2021/11/Learning-Loss-Akibat-Pembelajaran-Jarak-Jauh-Selama-Pandemi-Covid-19-di-Indonesia.pdf).
- Chabibi, M. (2019). Model analisis kebijakan publik dalam program beasiswa santri berprestasi Kemenag. *Jurnal Pemikiran Islam*, 5(1), 135–152.
- Destiana, B. (2013). Faktor determinan pemanfaatan TIK dan pengaruhnya terhadap kinerja guru SMK di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 1, 285–299.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (Fourteenth). Pearson
- Fatem, S. M., Awang, S. A., Maryudi, A., & Pudiatmoko, S. & J. M. (2020). Model kelembagaan lokal Kabupaten Konservasi Tambrau di Papua Barat. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 14, 167–184.
- Gusmaneli, Sepriyanti, N., & Sari, D. P. (2021). Pengembangan modul berbasis Means-Ends Analysis (MEA) untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada materi keliling dan luas bangun datar di kelas IV MIN 1 Padang Pariaman. *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad*, XI(1), 47–56.
- Hadiyat, Y. D. (2014). Kesenjangan digital di Indonesia. *Jurnal Pekommas*, 17(2), 81–90.
- Haking, D. D., & Soepriyanti, Y. (2019). Pengembangan media video pembelajaran renang pada mata pelajaran PJOK untuk siswa kelas V SD. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 2(4), 320–328.
- Iqbal, A. M., & Salomo, R. V. (2018). Analisis kebijakan pengenaan pajak atas bahan bakar minyak bersubsidi minyak solar.

- Jurnal Transparasi*, 1(1), 1–11.
- Istanti, D. J. (2018). Dinamika kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia pasca reformasi. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerinatahan*, 05(02), 140–156.
- Katadata. (2021). *Status literasi digital di Indonesia ringkasan eksekutif*. Katadata Insight Center.
- Khusna, I. H. (2019). Strategi pemerdayaan desa melalui pemanfaatan TIK di Kabupaten Pematang. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 23(2), 76–89.  
<https://doi.org/10.33299/jpkop.23.2.1309>
- Kominfo. (2020). *Indonesia terkoneksi*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia.
- Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode penelitian kuantitatif*. Pandiva Buku.
- Latifa, A. (2010). Aplikasi model pengambilan keputusan dalam perilaku fertilitas. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, v(1), 55–73.  
<https://doi.org/10.30659/ekobis.20.1.40-61>
- Maslan, A. (2014). Analisis faktor-faktor mempengaruhi kesenjangan digital studi kasus Bareleng (Batam, Rempang dan Galang) Kepulauan Riau. *CBIS Journal*, 2(2), 1–9.
- Maulana, H. F., Mayunita, S., Hastuti, & Wijaya, A. A. M. (2018). Diskursus kebijakan publik model incremental. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3(2), 1–13.  
<https://doi.org/10.35326/kybernan.v3i1.330>
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. *Jurnal Review Politik*, 06(02), 195–224.
- Mukhlis, A. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Dieng Wetan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo*.
- Mulyana, N., Utami, A., & Meutia, I. F. (2021). Digital divide pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. *Journal Wacana Publik*, 15(02), 59–63.
- Muttabiah, A., Suryani, E., & Hawa, A. M. (2021). Dampak penggunaan gadget terhadap interaksi sosial peserta didik. *Jurnal of Primary and Children's Education*, 4(2), 56–63.  
<https://doi.org/10.35473/jnctt.v4i2.1192>
- Nasirin, C., & Hermawan, D. (2017). Kontroversi implementasi kebijakan penanggulangan kapal dalam rangka pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 9–24.  
<https://doi.org/10.20961/sp.v12i1.11610>
- Oktavianoor, R. (2020). Kesenjangan digital akibat kondisi demografis di kalangan masyarakat rural. *Palimpsest: Jurnal Ilmu Informasi Dan Perpustakaan*, 11(1), 9–19.  
<https://doi.org/10.20473/pjil.v11i1.21888>
- PP. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*. PP RI Nomor 72 Tahun 2005.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(01), 1–12.
- Rapanta, C., Botturi, L., Goodyear, P., & Guàrdia, L. (2020). Online University Teaching During and After the Covid-19 Crisis: Refocusing Teacher Presence and Learning Activity. *Postdigital Sciene and Education*, 923–945.
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111–130.
- Sinambela, S. M., Lumbantobing, J. N. Y., Saragih, M. D., Mangunsong, A. F., Nisa, C., Simanjuntak, J. P., & Jamaludin, J. (2024). Kesenjangan Digital dalam Dunia Pendidikan Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 15–24.  
<https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/JUBPI/article/view/3003>
- Sjoraida, D. F., & Anwar, R. K. (2017). Urgensi unsur elit dalam pelaksanaan kebijakan informasi publik di Jawa Barat. *Jurnal Wacana Politik*, 2(2), 128–136.
- Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesehatan rakyat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, VI(02), 98–102.
- Susanti, W. F., Jannatuzzahra, K., Kartika, A.

- D. P., & Mukaromah, S. (2023). Upaya dalam mengurangi kesenjangan digital pada penerapan Smart Village. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 334–343. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.336>
- Susanto, R. (2016). Hubungan pengambilan keputusan rasional dengan akuntabilitas kepemimpinan Kepala Sekolah. *Jurnal Eduscience*, 2(1), 22–39.
- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, Masita, Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2022). Metodologi penelitian kuantitatif. In *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*. Yayasan Penerbit Muhamad Zaini.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Artianasari, N., & Qadaruddin, M. (2023). Perencanaan komunikasi pesantren Al-Risalah Batetanga upaya mengatasi digital divide. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 24–34.
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyantri, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model analisis kebijakan pendidikan. *Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192–201.
- Bahirah, H. I. (2022). Smart village sebagai jawaban desa masa depan. *Jurnal Kasijian Komunikasi Dan Studi Media*, 11(2), 23–35.
- Cerelia, J. J., Sitepu, A. A., N, F. A. L., Pratiwi, I. R., Almadevi, M., Farras, M. N., Azzahra, T. S., & Toharudin, T. (2021). Learning loss akibat pembelajaran jarak jauh selama pandemi covid-19 di Indonesia. *Seminar NASIONAL Statistik X*, 1(1), 1–14. [http://semnas.statistics.unpad.ac.id/wp-content/uploads/erf\\_uploads/2021/11/Learning-Loss-Akibat-Pembelajaran-Jarak-Jauh-Selama-Pandemi-Covid-19-di-Indonesia.pdf](http://semnas.statistics.unpad.ac.id/wp-content/uploads/erf_uploads/2021/11/Learning-Loss-Akibat-Pembelajaran-Jarak-Jauh-Selama-Pandemi-Covid-19-di-Indonesia.pdf)
- Chabibi, M. (2019). Model analisis kebijakan publik dalam program beasiswa santri berprestasi Kemenag. *Jurnal Pemikiran Islam*, 5(1), 135–152.
- Destiana, B. (2013). Faktor determinan pemanfaatan TIK dan pengaruhnya terhadap kinerja guru SMK di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 1, 285–299.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (Fourteenth). Pearson.
- Fatem, S. M., Awang, S. A., Maryudi, A., & Pudyatmoko, S. & J. M. (2020). Model kelembagaan lokal Kabupaten Konservasi Tambrauw di Papua Barat. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 14, 167–184.
- Gusmaneli, Sepriyanti, N., & Sari, D. P. (2021). Pengembangan modul berbasis Means-Ends Analysis (MEA) untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada materi keliling dan luas bangun datar di kelas IV MIN 1 Padang Pariaman. *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad*, XI(1), 47–56.
- Hadiyat, Y. D. (2014). Kesenjangan digital di Indonesia. *Jurnal Pekommas*, 17(2), 81–90.
- Haking, D. D., & Soepriyanti, Y. (2019). Pengembangan media video pembelajaran renang pada mata pelajaran PJOK untuk siswa kelas V SD. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 2(4), 320–328.
- Iqbal, A. M., & Salomo, R. V. (2018). Analisis kebijakan pengenaan pajak atas bahan bakar minyak bersubsidi minyak solar. *Jurnal Transparasi*, 1(1), 1–11.
- Istanti, D. J. (2018). Dinamika kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia pasca reformasi. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 05(02), 140–156.
- Katadata. (2021). *Status literasi digital di Indonesia ringkasan eksekutif*. Katadata Insight Center.
- Khusna, I. H. (2019). Strategi pemerdayaan desa melalui pemanfaatan TIK di Kabupaten Pematang. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 23(2), 76–89. <https://doi.org/10.33299/jpkop.23.2.1309>
- Kominfo. (2020). *Indonesia terkoneksi*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia.
- Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode penelitian kuantitatif*. Pandiva Buku.
- Latifa, A. (2010). Aplikasi model pengambilan keputusan dalam perilaku fertilitas. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, v(1), 55–73.

- <https://doi.org/10.30659/ekobis.20.1.40-61>
- Maslan, A. (2014). Analisis faktor-faktor mempengaruhi kesenjangan digital studi kasus Bareleng (Batam, Rempang dan Galang) Kepulauan Riau. *CBIS Journal*, 2(2), 1–9.
- Maulana, H. F., Mayunita, S., Hastuti, & Wijaya, A. A. M. (2018). Diskursus kebijakan publik model incremental. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3(2), 1–13. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v3i1.330>
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. *Jurnal Review Politik*, 06(02), 195–224.
- Mukhlis, A. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Dieng Wetan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo*.
- Mulyana, N., Utami, A., & Meutia, I. F. (2021). Digital divide pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. *Journal Wacana Publik*, 15(02), 59–63.
- Muttabiah, A., Suryani, E., & Hawa, A. M. (2021). Dampak penggunaan gadget terhadap interaksi sosial peserta didik. *Jurnal of Primary and Children's Education*, 4(2), 56–63. <https://doi.org/10.35473/jnctt.v4i2.1192>
- Nasirin, C., & Hermawan, D. (2017). Kontroversi implementasi kebijakan penenggelaman kapal dalam rangka pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 9–24. <https://doi.org/10.20961/sp.v12i1.11610>
- Oktavianoor, R. (2020). Kesenjangan digital akibat kondisi demografis di kalangan masyarakat rural. *Palimpsest: Jurnal Ilmu Informasi Dan Perpustakaan*, 11(1), 9–19. <https://doi.org/10.20473/pjil.v11i1.21888>
- PP. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*. PP RI Nomor 72 Tahun 2005.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(01), 1–12.
- Rapanta, C., Botturi, L., Goodyear, P., & Guàrdia, L. (2020). Online University Teaching During and After the Covid-19 Crisis : Refocusing Teacher Presence and Learning Activity. *Postdigital Sciene and Education*, 923–945.
- Renggana, R. S. (2008). Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam masyarakat teknologi informasi dan komunikasi (Gender & TIK). *E-Indonesia Initiative*, 21–23.
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111–130.
- Sinambela, S. M., Lumbantobing, J. N. Y., Saragih, M. D., Mangunsong, A. F., Nisa, C., Simanjuntak, J. P., & Jamaludin, J. (2024). Kesenjangan Digital dalam Dunia Pendidikan Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 15–24. <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/JUBPI/article/view/3003>
- Sjoraida, D. F., & Anwar, R. K. (2017). Urgensi unsur elit dalam pelaksanaan kebijakan informasi publik di Jawa Barat. *Jurnal Wacana Politik*, 2(2), 128–136.
- Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesehataraan rakyat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, VI(02), 98–102.
- Susanti, W. F., Jannatuzzahra, K., Kartika, A. D. P., & Mukaromah, S. (2023). Upaya dalam mengurangi kesenjangan digital pada penerapan Smart Village. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 334–343. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.336>
- Susanto, R. (2016). Hubungan pengambilan keputusan rasional dengan akuntabilitas kepemimpinan Kepala Sekolah. *Jurnal Eduscience*, 2(1), 22–39.
- Triastuti, M. R. H. (2003). Analisis formulasi kebijakan kenaikan tarif listrik, telepon dan BBM di Tahun 2003. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 71–86. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/631>
- Usriya, L., Farhan, M. N., Ainiyah, N., & Kholidah, L. N. (2023). Digital divide

(kesenjangan digital) dalam dunia pendidikan islam. *Universitas Negeri Malang, September*, 59–72.

Walukow, A. F. (2012). Analisis kebijakan penurunan luas hutan di daerah aliran sungai Sentani berwawasan lingkungan. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 19(1), 74–84.

Wibowo, L. R. (2013). Analisis kebijakan publik pengembangan model kelembagaan kompensasi DAS Ciliwung. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 20(3), 353–366.

Zikmund, Babin, Carr, & Griffin. (2010). *Business research methods* (Eighth). South Western Cengage Learning. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1086-5.ch003>